

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Apabila ketersediaan pangan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya, maka hal tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai masalah sosial dan politik juga dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. (Badan Urusan Logistik, 2014).

Masalah pangan merupakan salah satu masalah nasional yang terpenting. Masalah pangan meliputi ketersediaan bahan pangan, distribusi dan konsumsi. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. (Syaifullah, 2013). Permasalahan yang dihadapi para petani padi adalah menurunnya produksi padi yang merupakan dampak dari kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu. Seperti diketahui bahwa padi merupakan komoditas yang responsif terhadap curah hujan.

Risiko ketidakpastian yang cukup tinggi berkaitan dengan kerusakan usahatani dan risiko kegagalan panen akan mengakibatkan pendapatan petani dari berusahatani padi menjadi rendah. Produktivitas yang rendah memungkinkan petani untuk tidak mengelola lahannya dengan baik sehingga lahan tersebut dijual atau dialihfungsikan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi maka stabilitas ketahanan pangan nasional akan terganggu, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga akan mengalami penurunan. (Kementerian Pertanian, 2013).

Program pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional khususnya beras terus menerus dilakukan, melalui inovasi teknologi dan penerapan program perbaikan manajemen usahatani, mengingat beras merupakan bahan pangan pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia. Usaha pencapaian target swasembada pangan khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani (Pasaribu, 2016).

Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian sebagai bentuk advokasi kepada petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi, maka petani akan mendapat jaminan terhadap kerusakan tanaman padi baik karena kekeringan, terserang hama dan penyakit maupun akibat banjir. (DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019).

Penyelenggaraan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Indonesia mulai diberlakukan sejak tahun 2012. Program AUTP merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada petani dan aktivitasnya agar ketahanan pangan, khususnya di sektor tanaman padi, selalu terjaga. Program AUTP dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. Angka

keikutsertaan Program AUTP per Juli 2017 sudah mencapai 358.189 hektar dari target akhir tahun sebesar satu juta hektar. Pada tahun 2016, lahan yang berhasil dilindungi oleh Program AUTP adalah seluas 10.977 hektar dengan nilai sebesar Rp 66 Miliar. (PT. Asuransi Jasa Indonesia, 2017).

Program AUTP mulai digulirkan oleh pemerintah pusat di Yogyakarta pada tahun 2015. Pada awal diberlakukannya Program AUTP ini, belum banyak kelompok tani yang menjadi peserta AUTP dan klaim yang dicairkan juga relatif masih sedikit. Kelompok tani yang menjadi peserta AUTP tersebar pada empat kabupaten di D.I. Yogyakarta.

Tabel 1. Peserta AUTP tahun 2015 di D.I. Yogyakarta

Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani
Gunung Kidul	-
Sleman	32
Bantul	26
Kulon Progo	56

PT. Jasindo (2018)

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang merupakan kabupaten rawan bencana seperti potensi banjir, tanah longsor dan kekeringan. Kabupaten Kulon Progo bagian selatan merupakan daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Temon, Wates, Galur, Panjatan dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, kawasan ini merupakan kawasan rawan bencana banjir apabila musim penghujan datang. (Badan Pengasawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016).

Pada akhir tahun 2015, petani di Kabupaten Kulon Progo mulai menerapkan Program AUTP. Pada awal keikutsertaannya, Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan keikutsertaan petani terbanyak pada program asuransi tersebut. Meskipun memiliki peserta terbanyak dibandingkan dengan wilayah lain, tetapi

baru terdapat empat kecamatan yang telah ikut serta dalam Program AUTP yaitu Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur dan Kecamatan Temon. (PT. Jasindo, 2017). Program AUTP sudah berjalan tiga tahun terakhir, namun permasalahan yang dihadapi hingga saat ini masih berkaitan dengan respon petani atau kesadaran petani untuk mengikuti Program AUTP masih rendah serta keikutsertaannya belum konsisten dari waktu ke waktu.

Rendahnya minat petani untuk mengikuti Program AUTP salah satunya dikarenakan persyaratan yang sulit. Banyak keluhan-keluhan dari petani tentang ganti rugi atau klaim yang bisa dicairkan jika lahan pertanian yang gagal panen mencapai 75 persen. Petani berharap persentase tersebut bisa dikurangi. (Metro TV News, 2016). Banyaknya kendala seperti persyaratan serta kecenderungan minat petani yang masih rendah untuk mengikuti Program AUTP maka keberhasilan Program AUTP menjadi dipertanyakan, oleh karena itu perlu adanya evaluasi agar dapat diketahui sejauh mana program tersebut efektif untuk diterapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, menarik untuk diteliti, bagaimana pelaksanaan Program AUTP di Kabupaten Kulon Progo, seberapa besar tingkat keberhasilan Program AUTP di Kabupaten Kulon Progo dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Program AUTP di Kabupaten Kulon Progo.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan Program AUTP di Kabupaten Kulon Progo.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan Program AUTP di Kabupaten Kulon Progo.

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program AUTP di Kabupaten Kulon Progo.

C. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain adalah :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dapat digunakan sebagai alat untuk monitoring dalam pelaksanaan Program AUTP dan sebagai bahan perbaikan bagi kebijakan Program AUTP.
2. Bagi PT. Asuransi Jasa Indonesia, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja terkait Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP).
3. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan Program AUTP.